

WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM KEHIDUPAN NASIONAL DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

H. Budisantoso*

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berbudaya, sejak zaman dahulu hidup bermasyarakat, berkelompok-kelompok. Atas dasar berbagai kesamaan dan kesepakatan, kelompok-kelompok masyarakat tersebut membentuk bangsa. Bangsa yang telah menegara (membentuk negara bangsa), menentukan cita-cita dan tujuan nasional yang ingin dicapai.

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa negara bangsa (nation state) pada masa lalu, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara bangsa yang berjaya (berhasil) dalam mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan nasionalnya, adalah bangsa yang mampu memadukan pemikiran, sikap dan tindakan disertai kekuatan, tekad dan semangat bangsa, yang bahu membahu berjuang bersama demi tercapainya cita-cita dan tujuan yang mereka inginkan. Kepentingan nasional mereka utamakan melebihi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, golongan, dan kedaerahan. Keterpaduan upaya yang disertai dengan tekad dan semangat yang tinggi ini didasarkan adanya kesamaan persepsi dan cara pandang atau biasa disebut wawasan dalam mencapai tujuan nasional.

Wawasan dalam mencapai tujuan nasional dinamakan Wawasan Nasional yang dikembangkan dan dirumuskan berdasarkan falsafah bangsa dan kondisi wilayah dan rakyat negara bangsa serta lingkungan strategis yang mempengaruhi. Di sam-

* Mayjen TNI (Purn) H. Budisantoso Suryosumarto, S.E., Tenaga Ahli Kehormatan Lemhannas, Ka Pokja Tannas, Ka Pokja Kepemimpinan Nasional, Ka Pokja Bin S/PKN Lemhannas; Manggala BP-7 (Non Organik).

ping kesepakatan yang mantap tentang Wawasan Nasional, diperlukan kesepakatan tentang konsep pengembangan kekuatan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Bangsa Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945:

Alinea 2 (Cita-cita Nasional): negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmur.

Alinea 4 (Tujuan Nasional): melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Para pendahulu bangsa Indonesia telah mengembangkan Wawasan Nasional Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yang dinamakan Wawasan Nusantara (Wasantara), dan Ketahanan Nasional (Tannas) sebagai kondisi dinamis bangsa yang terus dibina dan dikembangkan agar selalu dapat mengatasi semua tantangan, ancaman, ham-

batan dan gangguan yang timbul. Dengan kesadaran persepsi dan kesepakatan dalam pengembangan kekuatan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, maka diharapkan tercipta keterpaduan sikap dan upaya bangsa Indonesia. Menurut Dr. Suyatno Kartodirjo, bangsa Indonesia perlu terus memegang teguh nilai "satu jiwa, satu perjuangan" seperti pada saat merebut dan mempertahankan Kemerdekaan RI, karena adanya satu cita-cita, tekad dan semangat untuk merdeka dan berjuang mengusir penjajah Belanda.

Wasantara dan Tannas telah diajarkan, di masyarakat melalui berbagai jalur dan media masa untuk dipahami, dihayati dan diamalkan. Sejak GBHN 1973, esensi Wasantara telah dimuat dalam Bab II, kemudian esensi Tannas menyusul dimuat dalam GBHN 1978. Namun berdasarkan pengamatan dalam kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional, memberikan indikasi bahwa Wasantara dan Tannas belum secara luas dipahami, dan dihayati oleh seluruh warga bangsa Indonesia, khususnya oleh para pemimpin bangsa pada supra maupun infra struktur, baik di pusat maupun daerah. Pemimpinlah yang mampu dan wajib mengarahkan dan menggerakkan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Dalam tulisan singkat ini, penulis ingin menyegarkan kembali pemahaman tentang Wasantara dan Tannas, serta mengajak para pembaca untuk berpikir tentang implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam perencanaan pembangunan. Tulisan ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkewenangan, para pemikir dan cendekiawan, dalam rangka memadukan upaya bersama mencapai tujuan nasional.

Pokok-Pokok Pengertian Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Secara umum, latar belakang pentingnya Wawasan Nasional dan Konsep Pengembangan Kekuatan bagi suatu bangsa telah diuraikan pada Pendahuluan dari tulisan ini. Secara subyektif Indonesia, pokok-pokok pengertian Wasantara dan Tannas adalah sebagai berikut:

1. Wawasan Nusantara

Wasantara adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang ber-sumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung nilai-nilai keutuhan (integralistik), kekeluargaan, dan keserasian. Wasantara dikembangkan

kan dengan mempertimbangkan:

(a) Kondisi geografis wilayah NKRI yang dikenal dengan nama Nusantara yang terdiri dari perairan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak pada khatulistiwa, di antara 2 benua dan 2 samudera, dengan segala ciri-cirinya, merupakan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia, (b) Rakyat Indonesia yang sangat beranekaragam suku, etnis, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat, sebagai penghuni Nusantara, (c) Sejarah perjuangan bangsa yang merupakan pengalaman pahit, terpecah belah dan dijajah bangsa lain lebih dari 300 tahun.

Dari uraian di atas, maka Wasantara mengajarkan mawas ke dalam agar bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan pada segenap aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk mengutamakan kelestarian lingkungan hidup tanah air Indonesia (periksa rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN 1993).

Sedangkan mawas ke luar, mengutamakan kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa, dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang adil dan sejahtera. Tanpa persatuan dan kesatuan, kelestarian lingkungan hidup dan jaminan terhadap kepentingan nasional, maka pencapaian tujuan nasi-

onal akan tersendat-sendat dan bahkan dapat terjadi penyimpangan, kemunduran (*setback*) dalam pembangunan nasional dan kehidupan nasional.

2. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Hakikat Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

Dalam uraian tersebut di atas, Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang diinginkan. Proses untuk mewujudkan kondisi tersebut memerlukan konsepsi yang dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional (Konsepsi Tannas).

Konsepsi Tannas adalah konsepsi pengembangan kemam-

puan dan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wasantara. Konsepsi Tannas merupakan sarana untuk mewujudkan kemampuan dan kekuatan nasional.

Hakikat Konsepsi Tannas adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan nasional.

Ketahanan Nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila, UUD 1945 dan berpedoman kepada Wasantara dalam segenap aspek kehidupan nasional secara terpadu, utuh menyeluruh.

Tannas mencerminkan keterpaduan delapan gatra (Astagatra) kehidupan nasional, yaitu Trigatra alamiah meliputi geografi, kekayaan alam dan kependudukan; Pancagatra sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya (sosbud) dan pertahanan keamanan (hankam). Ketahanan Nasional pada dasarnya tergantung kepada kemampuan bangsa Indonesia dalam memelihara dan memanfaatkan Trigatra untuk meningkatkan kondisi Pancagatra dalam wujud ketahanan ideologi, politik, eko-

nomi, sosbud dan hankam (pe-riksa rumusan Ketahanan Nasional dalam GBHN 1993).

Peranan Ketahanan Nasional dan Konsepsi Ketahanan Nasional dalam kehidupan nasional dan pembangunan nasional adalah: (a) Tannas merupakan tolok ukur kondisi keberhasilan penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional, (b) Tannas yang tangguh akan lebih mendorong laju pembangunan nasional dan keberhasilan pembangunan nasional akan lebih meningkatkan ketangguhan Tannas, (c) Konsepsi Tannas merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional, (d) Konsepsi Tannas sebagai pola dasar pembangunan nasional yang dilakukan melalui pertahapan Repelita.

Implementasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Kehidupan nasional secara universal biasanya distratakan menjadi supra struktur, infra struktur dan sub struktur. Dalam kehidupan nasional Indonesia dikenal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Implementasi dalam Kehidupan Bermasyarakat

Wasantara dan Tannas telah diajarkan dan dimasyarakatkan melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, namun karena besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Indonesia, serta maraknya berbagai pengaruh yang kurang menguntungkan, maka pemahaman dan penghayatan Wasantara dan Tannas dalam kehidupan bermasyarakat dirasakan belum mantap.

Kehidupan bermasyarakat masih mengandung kerawanan *latent* masalah SARA (suku, agama, rasial dan antar golongan), primordialisme, dan potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai dengan tahun 1997 masih terjadi beberapa kerusuhan massal yang bersumber pada masalah SARA ditambah dengan masalah kesenjangan sosial ekonomi, dipicu oleh masalah yang sebenarnya sepele. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa kerukunan hidup bermasyarakat, kerukunan hidup intra dan antar umat beragama, dan solidaritas sosial sebagai penopang persatuan dan kesatuan masih belum mantap. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adanya oknum subversif yang turut bermain dengan memanfaatkan kerawanan

tersebut, untuk kepentingannya atau kepentingan sponsornya.

Primordialisme, masalah SARA, masalah keadilan dan kesenjangan sosial ekonomi, secara bertahap akan dapat diatasi, bila seluruh warga masyarakat Indonesia memahami menghayati dan mengamalkan Wasantara dan Tannas. Demikian pula oknum subversif tidak akan mendapat banyak peluang apabila persatuan dan kesatuan kokoh. Pemahaman penghayatan, dan pengamalan Wasantara dan Tannas ini hendaknya dimulai dari setiap pribadi, meningkat ke keluarga, kelompok dan golongan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, dengan berpikir, bersikap dan bertindak mengutamakan persatuan dan kesatuan; turut memelihara kelestarian lingkungan hidup dan tidak bertindak *counter productive* terhadap Tannas (tindakan yang justru melemahkan Tannas).

2. Implementasi dalam Kehidupan Berbangsa

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kebangsaan Indonesia tidak didasarkan pada kesamaan suku, etnis, agama, budaya atau adat istiadat, tetapi didasarkan pada kesamaan cita-cita yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: negara Indonesia, yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan mak-

mur. Dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945: Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Perpecahan dalam kehidupan berbangsa sampai saat ini ber-sumber pada perbedaan cita negara tersebut (contoh: NII, PRRI), ingin memisahkan diri atau separatisme (contoh: Papua Merdeka, Aceh Merdeka, Timtim), perbedaan kepentingan kekuatan sosial politik, khususnya pada saat menjelang dan masa kampanye Pemilu (perpecahan PDI, tawuran/ atau gontok-gontokan antar pengikut Parpol/ Golkar).

Sumber-sumber perpecahan tersebut di atas akan secara bertahap dapat diatasi, bila Orsospol terutama para pemimpinnya, para pakar, dan tokoh-tokoh kharismatis di daerah, memahami dan menghayati cita-cita dan tujuan nasional, Wasantara dan Tannas. Orsospol dan Orkemas sesuai fungsinya berkewajiban mendidik anggotanya untuk memahami menghayati, dan mengamalkan Wasantara dan Tannas.

Kekuatan sospol hendaknya mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mengartikulasikannya ke dalam kepentingan golongan/ parpol untuk selanjutnya disalurkan kepada supra struktur dan diperjuangkan dengan mengindahkan budaya politik Pancasila (musyawarah

untuk mufakat, tidak memaksakan kehendak dan tidak adu kekuasaan/kekuatan), mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, golongan/parpol.

3. Implementasi dalam Kehidupan Bernegara

Dalam kehidupan bernegara, aspirasi masyarakat, kepentingan golongan/parpol diolah oleh supra struktur dengan mengacu kepada landasan idiil: Pancasila, landasan konstitusional: UUD 1945, dan landasan konseptual: Wasantara dan Tannas, menjadi keputusan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan program-program pembangunan. NKRI sebagai salah satu negara berkembang yang merebut kemerdekaan dengan revolusi fisik, banyak menghadapi permasalahan tentang peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini, adalah warisan zaman penjajahan Belanda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan dengan sendirinya tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Wasantara dan Tannas. Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa RI belum seluruhnya dengan tegas mengacu kepada Wasantara dan Tannas. Bebe-

rapa UU yang secara tegas mengacu kepada Wasantara dan Tannas, antara lain UU No.20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Hankamneg, dan UU No.2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. Di samping itu terdapat masalah-masalah baru yang belum diatur memerlukan peraturan perundang-undangan baru. Pemerintah bersama dengan DPR telah menyusun Program Legislasi Nasional untuk menggarap lebih dari 200 RUU. Kita semua mengharapkan agar pembahasan RUU mempertimbangkan benar-benar aspirasi masyarakat dan golongan/parpol dan mengacu kepada Wasantara dan Tannas.

Dalam penyelenggaraan hubungan internasional, Wasantara dan Tannas juga merupakan acuan yang diwujudkan ke dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif diabdikan kepada kepentingan nasional. Dengan perubahan situasi dunia yang makin cepat, menimbulkan tantangan, peluang, kendala dan ancaman baru, paradigma baru, serta era baru. Oleh karena itu politik luar negeri perlu disesuaikan dan diaktualisasikan untuk menjamin kepentingan nasional.

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam Era Globalisasi.

Kalau kita amati sejarah dunia dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sesungguhnya era globalisasi telah mulai pada abad XVI.

Akibat industrialisasi di Eropa Barat dan timbulnya kapitalisme, diperlukan daerah pasar dan pemasok bahan mentah di luar Eropa. Globalisasi pada waktu itu berwujud kolonialisme dan imperialisme, yang berakibat Nusantara menjadi daerah jajahan lebih dari 300 tahun.

Era globalisasi pada saat ini sampai awal abad XXI pada hakikatnya adalah globalisasi ekonomi dalam bentuk perdagangan bebas dan globalisasi informasi dalam bentuk sistem informasi seperti internet, siaran TV internasional, dan lain-lainnya. Perdagangan bebas barang, jasa, modal, dan uang, serta sistem informasi tidak mengenal batas-batas negara. Era globalisasi juga mengakibatkan dunia dirasakan semakin kecil (mengerut), sehingga menimbulkan kesadaran manusia untuk turut serta menjamin ketertiban dunia dan kelestarian lingkungan hidup. Kesadaran ini menimbulkan tuntutan hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, dan kelestarian lingkungan hidup. Tuntutan hati nurani manusia ini

tidak menutup kemungkinan digunakan dalih untuk menekan negara-negara berkembang oleh negara industri maju dengan menggunakan standar ganda (*double standard*).

Era globalisasi awal abad XXI menimbulkan tantangan, peluang dan kendala, serta ancaman dalam bentuk baru, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Tantangan terhadap Negara Bangsa (*Nation State*)

Penelitian Kenichi Ohmae sehubungan dengan era perdagangan bebas melampaui batas negara, antara lain menyimpulkan bahwa *nation state* tidak akan ada lagi. Pandangan ini bertolak dari pendapatnya bahwa negara industri maju akan selalu mendominasi negara berkembang dalam era perdagangan bebas. Namun kesadaran manusia untuk menciptakan tatanan dunia yang damai, adil, dan sejahtera, menghendaki tetap eksistensinya *nation state* sebagai subyek hukum internasional yang mengatur hubungan antar bangsa, serta menjamin kesejahteraan dan keamanan warga negara dari *nation state* masing-masing. Oleh karena itu NKRI sebagai *nation state* masih relevan dalam era globalisasi, dalam rangka mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan nasional Indonesia.

2. Tantangan terhadap Pancasila

Era globalisasi, khususnya era perdagangan bebas cenderung menuju perekonomian liberal (ekonomi pasar) dan bersifat kapitalistik. Kecenderungan ini bila tidak dapat dikendalikan akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang makin melebar, yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila yang mengandung nilai-nilai Ke Tuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial sangat relevan dengan tuntutan yang berdasarkan kesadaran manusia dalam era globalisasi. Dengan demikian Pancasila masih relevan dalam era globalisasi, baik sebagai landasan idiil penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional, maupun dalam hubungan internasional.

3. Peluang Kerjasama

Era perdagangan bebas mendorong terwujudnya kerjasama secara jujur dan saling menguntungkan. Pancasila yang mengandung nilai kekeluargaan, kemitraan sangat relevan dalam menjalin kerjasama baik secara bilateral, regional maupun internasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bersama.

Dalam kerjasama ini sesama *nation state* dituntut untuk saling memberi dengan sedikit mengurangi kedaulatan masing-masing, demi kepentingan bersama. Pengurangan sedikit kedaulatan tersebut, tidak akan menimbulkan masalah terhadap kemerdekaan dan kedaulatan *nation state*.

4. Kendala Daya Saing

Dalam era perdagangan bebas terdapat ketimpangan antara negara industri maju dengan negara berkembang. Negara industri maju menguasai keunggulan teknologi, modal dan kemampuan profesional dibandingkan dengan negara berkembang yang pada umumnya hanya memiliki sumber daya alam. Ketimpangan tersebut mengakibatkan daya saing produk barang dan jasa negara berkembang pada umumnya masih lemah. Negara industri maju menikmati nilai tambah yang besar, sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan nilai tambah yang kecil. Bahkan dalam persaingan ini negara industri maju dengan dalih tuntutan HAM, demokratisasi dan kelestarian lingkungan hidup, sering mengadakan tekanan-tekanan terhadap produk negara berkembang. Keadaan ini mengharuskan negara berkembang memperbaharui kehidupan nasionalnya dalam rangka mening-

katkan daya saingnya. Di samping itu berupaya meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan (antar negara berkembang) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing, dan meneruskan dialog Utara-Selatan (antara negara industri maju dengan negara berkembang) guna mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil dan sejahtera.

5. Ancaman Bentuk Baru

Era perdagangan bebas menimbulkan ancaman yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan politik dan militer. Ancaman tersebut antara lain dapat berakibat timbulnya krisis moneter dan keuangan yang dapat membahayakan kehidupan nasional suatu *nation state*. Keadaan ini dialami oleh Mexico, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philipina dan negara Asia Pasifik lainnya pada akhir-akhir ini, negara-negara tersebut mengalami krisis moneter dan anjloknya kurs mata uangnya terhadap US Dollar. Dalam upaya menghadapi ancaman bentuk baru ini diperlukan berbagai pengetahuan yang relevan seperti pengetahuan tentang perekonomian global, tindakan yang tepat dengan penuh kehati-hatian, serta kerja sama internasional untuk mengatasinya.

Dari analisis tentang tantangan, peluang, dan kendala serta ancaman di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila dan NKRI masih relevan dalam era globalisasi, dan berdasarkan cita-cita nasional memang seharusnya bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan Pancasila dan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai konsekuensi logis, maka Wasantara dan Tannas yang bersumber kepada Pancasila masih tetap relevan dalam era globalisasi. Wasantara dan Tannas merupakan landasan konseptual dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasional serta menjamin kepentingan nasional Indonesia.

Dalam era globalisasi diperlukan kesamaan cara pandang (persepsi) tekad dan semangat, serta keterpaduan upaya dalam memperbaharui kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan guna meningkatkan daya saing, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu Wasantara dan Tannas dalam era globalisasi harus terus dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh warga negara NKRI.

Konsepsi Tannas dalam Perencanaan Pembangunan

Membahas konsepsi Tannas dalam Pembangunan sesungguhnya merupakan implementasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian pembangunan. Dari uraian terdahulu dapat diketemukan kaidah-kaidah dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut: (1) Mampu menjawab tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, serta peluang dan kendala baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (termasuk dampak era globalisasi). Perencanaan pembangunan hendaknya mempertimbangkan kecenderungan situasi dalam dan luar negeri, sehingga perencanaan pembangunan mampu menterpadukan kepentingan nasional di luar negeri dengan kepentingan nasional di dalam negeri, (2) Mampu makin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelestarian lingkungan hidup dalam wadah NKRI. Perencanaan pembangunan hendaknya secara bertahap mampu mewujudkan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan keamanan, sesuai butir-butir Wasantara dalam Bab II GBHN, (3) Mampu pada setiap tahap pem-

angunan, bertolak dari kondisi nyata (riil) meningkatkan Ketahanan Nasional yang diharapkan di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metoda Astagatra dapat dievaluasi kondisi Tannas saat ini, kemudian direncanakan kondisi Tannas yang diharapkan di masa mendatang, (4) Mampu menterpadukan perencanaan pembangunan secara vertikal dan horisontal.

Pembangunan dilakukan secara komprehensif integral dalam segenap aspek kehidupan nasional dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Wasantara.

a. Secara vertikal

Perencanaan pembangunan hendaknya mampu menterpadukan kepentingan dan aspirasi masyarakat dengan arahan dari atas (*bottom up* dan *top down planning*).

b. Secara horizontal

Perencanaan pembangunan hendaknya mampu menterpadukan antar bidang dan sektor pembangunan dengan menentukan sasaran pembangunan yang harus dicapai oleh segenap sektor terkait, dengan menentukan pula departemen/ lembaga sebagai penanggung jawab utamanya (*primary responseble*).

Perencanaan pembangunan hendaknya juga mampu menterpadukan pembangunan antar daerah/wilayah, serta memman-

faatkan peluang kerjasama regional dengan negara tetangga.

Harapan

Mengingat besarnya jumlah rakyat Indonesia dan luasnya wilayah nusantara, serta kuatnya pengaruh terhadap kehidupan nasional Indonesia, maka pemasyarakatan Wasantara dan Tannas perlu terus ditingkatkan, diperluas jangkauannya dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan oleh seluruh warga negara NKRI, khususnya aparatur negara dan aparatur pemerintah sebagai subyek pembangunan. Landasan hukum pemasyarakatan Wasantara dan Tannas telah tercantum dalam GBHN Bab II. Namun pemahaman, penghayatan dan pengamalannya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional masih perlu ditingkatkan. Di samping itu para penyusun UU (legislator) juga dituntut pemahaman dan penghayatan kedua konsepsi tersebut, agar tidak terjadi pengaturan yang tumpang tindih, mampu menentukan prioritas yang tepat, mengutamakan

persatuan dan kesatuan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara serasi.

Pengkajian, penelitian oleh para pakar, kalangan perguruan tinggi, dan para pemimpin bangsa sangat diperlukan dalam rangka memantapkan rumusan Wasantara dan Tannas, menentukan kedudukan yang tepat bagi Wasantara dan Tannas sebagai landasan konseptual dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional, serta meningkatkan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penutup

Demikianlah sekedar sumbangan pemikiran, agar menjadi bahan pertimbangan bagi para pemimpin bangsa, para pemikir dan cendekiawan baik pada supra struktur, infra struktur dan substruktur, di pusat dan daerah. Semoga Tuhan Yang Esa meridhoi upaya bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasional.